



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD KAB.PASER DENGAN TAPD KAB.PASER MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KAB.PASER TAHUN ANGGARAN 2019

A. DASAR

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser Tanggal 29 Juli 2019, membahas jadwal kegiatan Bulan Agustus Tahun 2019, masa persidangan Ke-II (dua) Tahun 2019.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 253 /DPRD, tanggal 29 Juli 2019, dengan tujuan Bupati Paser.
3. Surta Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/ 254 / DPRD, tanggal 29 Juli 2019 dengan tujuan Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Kab.Paser.

B. TUJUAN

Adapun tujuan diadakannya Rapat Banggar DPRD Kab.Paser adalah untuk membahas Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA.2019

C. WAKTU & TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 5 Agustus 2019
Pukul : 13.00 wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh IKHWAN ANTASARI selaku Ketua DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

1. Anggota DPRD Kabupaten Paser (.....Orang)
2. TAPD Kabupaten Paser (.....Orang)
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Paser (.....Orang)
(Daftar hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN

Penjelasan TAPD Kab.Paser Terkait dengan Penjelasan Rencana Pendapatan dan Belanja di Perubahan APBD TA.2019:

- **SEKDA Kab.Paser:** Untuk diperubahan terdapat penambahan pendapatan sekitar 158 Milyar, dan rencana Pendapatan diperubahan 2.414.209.628.322 Triliun dari 2.256.065.924 Triliun, sedangkan rencana belanja diperubahan 2.710.870.923.000 dari 2.393.565.924.000 atau bertambah sekitar 317Milyar. Untuk MY dianggarkan diperubahan sekitar 80 Milyar dari kewajiban sisa yang dianggarkan 241 Milyar. Sisanya 161 Milyar dianggarkan di APBD TA.2020 sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
 - **ABDULLAH:** Menginginkan pembahasan perubahan APBD TA.2019 segera mungkin dilakukan dan di sahkan mengingat, pelantikan DPRD baru akan dilaksanakan. Selain dari pada itu kesibukan DPRD baru bisa menghambat proses pengesahan Perubahan TA.2019. Beberapa hal terkait MY sudah diakomodir 80M di perubahan APBD TA.2019. Kemudian terkait perubahan nomenklatur ada beberapa yang sudah terakomodir, terdapat 1 kegiata yang belum terubah yaitu Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 Desa Kerang Kec. Batu engau, serta perubahan Nomenklatur Pokir An. Robert saragih (Pembangunan Embung Desa Suliliran Baru Kec. Paser Belengkong dirubah menjadi Pembangunan Embung Desa Suliliran Kec. Paser Belengkong. Untuk anggaran Sekretariat sudah terpenuhi, dan mengingatkan untuk anggaran APBD dianggarkan full 1 Tahun.
 - **KABID SARPRAS:** Untuk perubahan Nomenklatur pada dinas perumahan: Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 Desa Kerang Kec. Batu engau Dirubah Menjadi Semenisasi Gang. Al Berkah Desa Senaken Kec. Tanah Grogot. Untuk jalan lingkungan RT.07, sudah jalan perencanaannya dan akan dikordinasikan dengan dinas teknis terkait.
 - **DODY SATWIKA :** Bagaimana perkembangan rencana anggaran PILKADA 2020. Sejauh ini belum tertera di Penjabaran Nota Keuangan Perubahan APBD TA.2019, setidaknya jika anggaran tersebut tersedia di perubahan 2019 maka dari KPU sudah bisa melaksanakan beberapa Tahapan PILKADA.
 - **HENDRAWAN PUTRA:** untuk MY peningkatan jalan padang pangrapat kec. Tanah Grogot, apakah kegiatan ini sudah terbayarkan dimurni 2019 atau masih ada sisa pembayarannya di perubahan ini? Kemudian kegiatan MY lain seperti IKK komam, IKK batu Sopang, IKK Komam.
 - **SEKDA:**
 1. Sependapat dengan Pak Abdullah, karena kondisi waktu harus dipercepatan proses pembahasannya?
 2. Pergeseran nomenklatur aka disesuaikan
 3. Untuk anggaran di Setwan, diharapkan bisa diakomodir full 1 tahun dan diupayakan.
 4. Untuk anggaran PILKADA rencana akan diakomodir di TA.2020
- KEPALA BAPPEDA (Pak Muksin)**
1. Perubahan nomenklatur akan ditindaklanjuti
 2. Untuk MY akan dibayar sesuai dengan progress yang dianggarkan 80 M diperubahan
 3. Untuk anggaran KPU, proposal permohonan baru dikirimkan, oleh karena itu belum bisa dianggarkan di perubahan TA.2019, dan rencanakan dianggarkan di APBD 2020, seharusnya KPU mengusulkan melalui kesbangpol dan diteruskan ke Bappeda. Dan selama ini anggaran untuk KPU bisa terpenuhi
- SYAUKANI:**
1. Untuk perubahan nomenklatur embung suliliran baru sudah dirubah (APBD TA.2019)
 2. Untuk MY padang pangrapat kec. Tanah Grogot sudah dibayarkan 100% di APBD TA. 2019.

3. Peningkatan Jalan Padang Pangarapat Muara Pasir diperubahan teranggarkan 2 Milyar.
4. Untuk IKK kerang (1.535 Milyar sekian), batu sopang dan muara komam sudah dianggarkan diperubahan dan 100% Prog fisiknya.
- 5.

BU WINA:

1. IKK kerang 1.535 Milyar Skian
2. IKK Batu Sopang 8,5 Milyar Skian
3. IKK komam sisa perubahan 3,88 Milyar Skian

SUPIAN: Perubahan Nomenklatur Saja, Peningkatan Jalan Julang Kec. Longkali dirubah menjadi lanjutan semenisasi Jalan Jumai Kec. Long Kali. Terkait dengan MY dekoy Long Kali terdapat berapa tambahan diperubahan?

NURHAYATI: Untuk anggaran benkeu Provinsi diharapkan bisa mengakomodir anggaran pendidikan

KEPALA BAPPEDA:

Untuk usulan benkeu prov harus melalui Sistem informasi perencanaan daerah yang masuk bulan April untuk pengusulan ditahun anggaran selajutnya. Karena SIPD adalah rangkuman dari semua usulan musrembang. Jika ada usulan diluar itu tidak bisa masuk.

SYAUKANI : MY yang dianggarkan di Perubahan 2019 sebesar 80 Milyar: Suatang ketebang suatang baru diperubahan 8,3 Milyar, jembatan mendik perubahan 4,4 Milyar, padang pangrapat muara pasir diperubahan 2 Milyar, muara kuaro muara payang diperubahan 8 Milyar, kinjang muara adang diperubahan 15 Milyar, longkali seabkung maruat diperubahan 8 Milyar, longkali belimbing dekoy perubahan 7 Milyar, damit 2 Milyar diperubahan, sisa keseluruhan 2020 161 Milyar.

KEPALA BAPPEDA:

- Untuk Bu Nurhayati Bankeuprov 326 Milyar dari insfrastruktur di Murni 2019 pada saat sudah menyepakati murni 2019, yang menyebabkan anggaran pada dinas pendidikan berkurang sebesar 18% dari 20%, dan mendapat teguran dari kementrian keuangan dan akhirnya terbebani di perubahan sebesar 77 Milyar dianggarkan untuk menutupi kekurangan. Dan diperubahan masuk lagi 100 Milyar dari Bankeuprov. Untuk tahun 2020 diharapkan ada untuk anggaran bantuan pendidikan dan besarannya disesuaikan.

NURHAYATI: pendidikan harus 20%, namun dari masyarakat saat kita reses yang dikeluhkan hanya jalanan dan irigasi saja. Artinya pada saat DPRD akan mengusulkan tentang pendidikan tapi tidak selalu ada usulannya. Dan sebaiknya di komunikasikan dengan pusat terkait hal tersebut.

ABDULLAH: menanggapi bankeuprov, kalo kita ini ingin cepat tercover insfrastruktur kita tidak perlu pembuatan irigasi, kita hanya memerlukan peningkatan irigasi saja. Pemerintah Daerah sebelum mengusulkan kegiatan menyurat ke provinsi, meminta usulan disesuaikan kebutuhan, untuk insfrastruktur berapa, pendidikan berapa dan lain sebagainya.

SEKDA:

- Terkait dengan bankeu , terutama terkait dengan 20%, artinya apa yang kita usulkan dapat mengakomodir pendidikan, dan kita berharap usulan DPRD dari bankeu bisa mewakili 20% dari pendidikan.
- Terkait dengan normalisasi irigasi, diakui bahwa luas lahan dengan capaian irigasi yang direalisasikan sudah tidak seimbang, karena normalisasi yang ada saat ini fungsinya bukan mengatur air, tapi justru mengeluarkan air dari percetaka sawah yang ada, karena tidak ada bendungan utama. Artinya kita perlu bentuk normalisasi irigasi dan pembuatan pintu air.

HAMRANSYAH :

- Terkait dengan anggaran internal DPRD Kab.Paser dengan waktu 4 bulan, diharapkan tambahan yang ada bisa terserap dengan baik, dan kedepannya diharapkan bisa full 1 tahun disesuaikan dengan usulan masing-masing bagian.
- Terkait dengan pemadam kebakaran perlu penambahan anggaran untuk menujung peralatan dan lainnya.

- Bukan hanya normalisasi irigasi, tapi juga bantuan-bantuan terhadap pembuatan penampungan air PDAM.
- Termasuk juga BPJS kesehatan, kemudian obat-obatan dan bagaimana sistem pengadaanya.

SEKDA:

- Terkait dengan anggaran sekretariat diharapkan serapannya sesuai yang diharapkan.
- Terkait dengan pemadam kebakaran, diharapkan dapat didukung sarana dan prasarananya, terutama jika ada kasus kebakaran, ketersediaan armada dan lainnya.

SEKWAN:

- Terkait dengan usulan sekretariat DPRD diharapkan sesuai dengan yang diharapkan. Saya berharap pada anggaran selanjutnya bisa dianggarkan 10-11 Bulan disetiap anggaran, artinya anggaran yang disediakan cukup sampai pada proses pembahasan perubahan. Kemudian dengan kebutuhan rumah dinas unsur pimpinan periode yang baru.

ABDURRAHMAN KA:

- Terkait dengan rumah singgah pasien, perlu peningkatan jalan masuknya, berharap bisa diakomodir diperubahan.

AMIRUDDIN:

- bagaimana progres rumah adat?

KEPALA DINAS PU:

- masih berupa pondasi dan tiang, berharap diperubahan ini terdapat tambahan anggaran dan dapat diselesaikan di 2020.

KEPALA BPKAD:

- diharapkan setiap pembahasan dapat dilakukan dengan baik, dan dapat mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kemudian dari BPKAD selalu melakukan koordinasi dengan BAPEDA untuk melakukan sinkronisasi terhadap semua kegiatan, guna percepatan pengesahan APBD perubahan dan segera evaluasi diprovinsi serta memperoleh nomer registrasi.

ASISTEN EKONOMI:

- sebagaimana yang disampaikan bahwa belanja kita diperubahan 2019 telah mencapai 2,7T, artinya terdapat penambahan sekitar 400M yang bisa kita gunakan didalam perubahan ini. Dan ini merupakan kondisi yang baik dan bisa mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan.
- Untuk MY sudah bisa diakomodir, dari 62 menjadi 80M.
- Peningkatan jalan pasir mayang sudah teralokasi diperubahan.
- Kondisi keuangan terpenuhi, mandetori spending terpenuhi dan proyek tahun tunggal sudah terpenuhi.
- Khusus kesra bag.ekonomi, memang ada perangkat daerah kita yang terkendala belanja hibah, dan greadnya masih merah, masalah utama adalah untuk belanja hibah yang belum bisa terealisasikan dan sebagian besar adalah belanja yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Jika memang hal tersebut tidak bisa direalisasikan sebaiknya dikomunikasikan dengan perangkat daerah terkait dan secepatnya dirubah, sehingga tidak menjadi SILPA diakhir anggaran.

ABDUL LATIF THAHA:

- Mohon setiap pertanyaan dan jawaban pada saat pembahasan ini didokumentasikan, karena kita sedang ada penilaian kinerja dari BPK.
- Diharapkan bantuan hibah yang berhubungan dengan yayasan tidak diletakan di DIKNAS, karena pengalaman tahun ini terdapat kesulitan terhadap pencairan dana tersebut.
- Kemudian dengan insentif guru-guru agama diharapkan bisa diperjuangkan.

G. KESIMPULAN

Hasil rapat Banggar DPRD Kab.Paser dengan TAPD Kab.Paser terkait pembahasan PERUBAHAN RAPERDA APBD TA.2019, selanjutnya sesuai dengan jadwal banmus

H. PENUTUP

Demikian Notulen ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tana Paser , 5 Agustus 2019

PIMPINAN RAPAT

TTD

IKHWAN ANTASARI